

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TARGET INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA SULIT TERCAPAI:
SEBUAH ANALISIS TERHADAP LINGKUNGAN STRATEGIS**

Iis Sandra Yanti, Muhammad Ilham, Khasan Effendy, Sampara Lukman
Email: starbuss99@gmail.com

Abstract

Human Development Index (HDI) is still used for determining the quality of human life in local government. In local government, specially in industrial region, HDI is to hard to be achieved. Bekasi regency as the biggest industrial region of the South-East Asia also has same problem about achieving HDI target annually. With qualitative method, this research tries to identify factors that causing HDI target of Bekasi Regency is not achieved in 2012-2017 period. Some results shows that the factors are natural environment, social environment, and task environment.

Keywords: Human Development Index; Environmental Scanning; Local Government; Local Development.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan mengenai capaian kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan sampai dengan era reformasi saat ini, berbagai kebijakan perencanaan pembangunan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah memberikan perhatian khusus terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara.

Proses perjalanan dari waktu ke waktu perhatian pemerintah termasuk para elit kekuasaan, akademisi, maupun pengamat politik tertuju pada perkembangan *Human Development Indeks* (HDI) yang setiap tahun dirilis oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) sebagai lembaga yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perkembangan pembangunan sumber daya manusia atau indeks pembangunan manusia tersebut seringkali menuai berbagai kritik dan saran, namun demikian semua pihak sepakat bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah terutama yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat khususnya bidang sosial dan ekonomi. Sebagaimana tulisan Oliver Holmes dalam Irwan Abdullah (2010 : 82) bahwa :

The greatest tragedy in America is not the destruction of our national resources, thought that tragedy is great. The truly great tragedy is the destruction of our



human resources by our failure to fully utilize our abilities, which means that most men and womwn go their graves with their music still in them

Pandangan Holmes tersebut menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan suatu negara, dan mengabaikan aspek tersebut merupakan sebuah kesalahan besar. Oleh karena itu peningkatan mutu pembangunan manusia tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, namun perlu didukung juga oleh peran masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan upaya sistematis dan terintegrasi dalam semua aspek kehidupan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Pendekatan pembangunan manusia lebih dititikberatkan pada pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia mencakup semua isu yang ada di masyarakat mulai dari pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, perdagangan, serta nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 alinea ke-4 (empat) diamanatkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang akan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ke-5 (lima) sila dalam Pancasila. Bentuk pelaksanaan amanat tersebut dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia di Indonesia yang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia” (IPM). Sebagai wujud tanggungjawab pemerintah terhadap pembangunan manusia di Indonesia, maka dikeluarkanlah berbagai kebijakan strategis berupa regulasi yang mengatur secara teknis mulai dari perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi nilai indeks pembangunan manusia di Indonesia karena pembangunan manusia dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita luhur tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konsep IPM pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada Tahun 1990 dimana IPM dianggap sebagai perluasan pilihan bagi penduduk. IPM dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk menambah “jangkauan pilihan” sekaligus sebagai alat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih layak. Dari sudut pandang yang lain, pembangunan manusia juga dapat didefinisikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik terhadap taraf pendidikan, kesehatan dan perekonomian melalui pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Pengertian ini memberikan makna yang lebih luas dibandingkan pembangunan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang layak dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dalam Analisa Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (2018 : 3) paradigma pembangunan manusia mengandung 4 (empat) komponen utama, yaitu :



1. Produktivitas yaitu manusia harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam upaya memperoleh penghasilan dan lapangan kerja. Apabila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, pengertian ini menafsirkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan manusia.
2. Ekuitas/Pemerataan yaitu setiap orang harus memiliki akses untuk memperoleh kesempatan yang sama. Semua persoalan dan hambatan terhadap peluang ekonomi maupun politik harus ditiadakan sehingga manusia/masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.
3. Kesenambungan yaitu akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia tidak hanya bagi generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang dimana segala bentuk permodalan baik fisik, manusia maupun lingkungan hidup harus dapat diperbaharui.
4. Pemberdayaan yaitu pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka melainkan untuk seluruh *stakeholder* yang ada. Masyarakat harus berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Berdasarkan paradigma pembangunan manusia yang dikemukakan oleh BPS tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan manusia meliputi produktivitas, yaitu seseorang harus bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang telah dilakukannya dalam berbagai sendi kehidupan, ekuitas/pemerataan yaitu semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam upaya mencapai tujuan kehidupannya, berkesinambungan yaitu dilakukan secara terus-menerus (tidak putus pada periode tertentu) serta pemberdayaan yaitu suatu upaya untuk bangkit dan mandiri membangun kehidupan dalam upaya mencapai tujuan hidup.

Dalam mengukur tingkat pemenuhan 4 (empat) komponen utama pembangunan manusia tersebut, UNDP menyusun indeks komposit yang terdiri dari 3 (tiga) indikator utama yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf penduduk dewasa, angka rata-rata lama sekolah, dan daya beli masyarakat yang merupakan ukuran pendapatan yang sudah disinergikan dengan paritas daya beli masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dirilis oleh BPS dalam Analisa Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (2018 : 10) bahwa indikator indeks pembangunan manusia (Human Development Index) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Indikator tersebut tidak hanya memperhitungkan kualitas fisik saja yang bisa dilihat dari angka harapan hidup, akan tetapi juga mengukur kualitas non fisik (pengetahuan) yang ditunjukkan dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama



sekolah serta memperhitungkan kemampuan perekonomian masyarakat dalam suatu wilayah yang ditunjukkan dengan purchasing power parity index (ppp).

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan data statistik Tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 45.161.325 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa 20 persen penduduk Indonesia ada di Jawa Barat. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang demikian besar, memberikan persoalan tersendiri dalam pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat, khususnya terhadap pembangunan IPMnya. Luasnya wilayah dan banyaknya penduduk Jawa Barat menimbulkan problem sosial yang cukup tinggi khususnya dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat berupa pendidikan dan kesehatan serta perbaikan taraf hidup masyarakat Jawa Barat. Nilai IPM Jawa Barat selama kurun waktu 2013-2018 tidak terlalu mengembirakan, karena realisasinya selalu dibawah IPM Nasional.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Uraian	IPM					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Provinsi Jawa Barat	68,25	68,80	69,50	70,05	70,69	70,99
Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,33

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (2019 : II-49)

Posisi IPM Jawa Barat secara nasional juga belum masuk peringkat 10 (sepuluh) besar, yaitu baru menempati posisi 12 s.d 10 selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Padahal Provinsi Jawa Barat memiliki potensi perekonomian yang cukup baik dengan didukung oleh sektor perindustrian dan sektor pertanian, ditambah lagi kontribusi PDRB pulau terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terbesar berasal dari Pulau Jawa, yaitu 58,5 persen pada tahun 2016-2017 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,6 persen.

Perolehan nilai IPM Jawa Barat tersebut, merupakan kontribusi dari perolehan IPM kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat salah satunya adalah Kabupaten Bekasi. Secara umum nilai IPM di Kabupaten Bekasi meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi kenaikan nilai IPM tersebut belum mampu meningkatkan posisi IPM Kabupaten Bekasi di tingkat Propinsi Jawa Barat. Selama kurun waktu 2012-2017 posisi IPM Kabupaten Bekasi masih menduduki posisi yang sama yaitu ada di peringkat 8 (delapan) dari 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berikut ini disajikan tabel IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut :



Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017

NO	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kabupaten Bogor	65,66	66,74	67,36	67,77	68,32	69,13
2	Kabupaten Sukabumi	62,27	63,63	64,07	64,44	65,13	65,49
3	Kabupaten Cianjur	60,28	61,68	62,08	62,42	62,92	63,70
4	Kabupaten Bandung	68,13	68,58	69,06	70,05	70,69	71,02
5	Kabupaten Garut	61,04	61,67	62,23	63,21	63,64	64,52
6	Kabupaten Tasikmalaya	61,69	62,40	62,79	63,17	63,57	64,14
7	Kabupaten Ciamis	66,29	67,20	67,64	68,02	68,45	68,87
8	Kabupaten Kuningan	65,60	66,16	66,63	67,19	67,51	67,78
9	Kabupaten Cirebon	64,48	65,06	65,53	66,07	66,70	67,39
10	Kabupaten Majalengka	63,13	63,71	64,07	64,75	65,25	65,92
11	Kabupaten Sumedang	67,36	68,47	68,76	69,29	69,45	70,07
12	Kabupaten Indramayu	62,09	62,98	63,55	64,36	64,78	65,58
13	Kabupaten Subang	64,86	65,48	65,80	66,52	67,14	67,73
14	Kabupaten Purwakarta	66,30	67,09	67,32	67,84	68,56	69,28
15	Kabupaten Karawang	65,97	66,61	67,08	67,66	68,19	69,17
16	Kabupaten Bekasi	69,38	70,09	70,51	71,19	71,83	72,63
17	Bandung Barat	63,17	63,93	64,27	65,23	65,81	66,63
18	Pangandaran	-	64,73	65,29	65,62	65,79	66,60
19	Kota Bogor	72,25	72,86	73,10	73,65	74,50	75,16
20	Kota Sukabumi	69,74	70,81	71,19	71,84	72,33	73,03
21	Kota Bandung	78,30	78,55	78,98	79,67	80,13	80,31
22	Kota Cirebon	71,97	72,27	72,93	73,34	73,70	74,00
23	Kota Bekasi	77,71	78,63	78,84	79,63	79,95	80,30
24	Kota Depok	77,28	78,27	78,58	79,11	79,60	79,83
25	Kota Cimahi	74,99	75,85	76,06	76,42	76,69	76,95
26	Kota Tasikmalaya	67,84	68,63	69,04	69,99	70,58	71,51
27	Kota Banjar	67,53	68,01	68,34	69,31	70,09	70,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018

Berdasarkan data tersebut, tentu saja peningkatan nilai IPM menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan terobosan dan inovasi lebih maksimal, mengingat posisi Kabupaten Bekasi yang sangat strategis yaitu merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang lokasinya berdekatan dengan pusat pemerintahan, masuk dalam wilayah pengembangan JABODETABEKPUNJUR serta merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Belum lagi kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi terhadap nilai PDRB Provinsi Jawa Barat yang selalu berada pada posisi teratas. Hal ini setidaknya bisa menjadi pengungkit posisi IPM Kabupaten Bekasi karena PDRB memiliki keterkaitan dengan pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi



makro, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya merupakan indikator pengukuran kinerja pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Lebih lanjut menurut BPS (2008 : 1) dalam Profil Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bekasi Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2018 disebutkan bahwa PDRB merupakan salah satu indikator makro untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian, pertanyaan penelitiannya adalah mengapa Target IPM Kabupaten Bekasi 2012-2017 tidak tercapai? Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teori Manajemen Strategis yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger (2012) yang meliputi variable Environmental Scanning, Strategi Formulation, Strategi Implementation dan Evaluation and Control. Namun artikel ini akan memfokuskan pada aspek analisis Environmental Scanning yang meliputi External Opportunities and Threats.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menurut John W Creswell (2016 : 4-5) penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi makna yang oleh kelompok tertentu dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari informan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data laporan akhir dari penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual dan menerjemahkan kompleksitas sebuah persoalan. Sedangkan menurut Wolcott (2009:11), pendekatan kualitatif berdasar pada penyusunan tabel analisa yang diperoleh dari hasil data interview serta memproyeksikan data interview tersebut. Dalam penelitian dibutuhkan beberapa data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara mendalam, dokumen, data statistik serta dokumen pendukung lainnya. Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap beberapa informan yang ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, akan dilakukan verifikasi dan penggalian secara lebih mendalam terhadap fakta yang ada dari informasi dan dokumen yang diperoleh sehingga bisa diketahui opini dan pandangan dari informan melalui tatap muka langsung dengan informan yang telah ditentukan.

HASIL PENELITIAN

External Opportunies and Threats

Pengamatan terhadap lingkungan merupakan serangkaian penilaian dan monitoring untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan bagi lingkungan organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengamatan terhadap lingkungan bertujuan untuk



mengantisipasi terjadinya permasalahan di lingkungan organisasi sehingga segera dapat diambil kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam upaya untuk menghasilkan pengamatan lingkungan secara optimal, maka perlu dilakukan analisis lingkungan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh perencana-perencana strategi dalam menentukan peluang atau ancaman.

a. Natural Environment

Lingkungan eksternal merupakan bagian yang sangat strategis dalam mencapai tujuan organisasi. Derajat lingkungan eksternal juga bervariasi tergantung kondisi objek yang akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh O'Regan, N & Ghobadian, A (2005 : 69) :

The importance of the external environment varies, depending on whether the firm operates in a stable or turbulent market. The more complex or dynamic the environment, the greater the degree of uncertainty. Consequently, in a dynamic market, greater emphasis is given to the external environment.

Pendapat O'Regan & Ghobadian, A menegaskan bahwa lingkungan eksternal memiliki tingkat kepentingan yang bervariasi tergantung kestabilan perusahaan yang beroperasi di pasar. Tingkat ketidakpastian semakin besar manakala lingkungan semakin dinamis atau kompleks. Untuk itu, penekanan yang lebih besar diberikan pada lingkungan eksternal bagi pasar yang dinamis. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi, pengamatan terhadap lingkungan eksternal harus dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap strategi manajemen perencanaan IPM di Kabupaten Bekasi.

Secara empiris, sebagaimana dilansir dalam Kabupaten Bekasi dalam Angkat Tahun 2019, Kabupaten Bekasi dilalui oleh 18 (delapan belas) aliran sungai/kali diantaranya Kali Ulu, Cikarang, Cikedokan, Sadang, Cibeureum, Ciherang, Cilemahabang, Jaeran, Jambe, Sasak Jarang, Cipamingkis, Cibeet, CBL, Bekasi, Pisangan, Blencong, Babakan, Cikadu. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk irigasi, jaringan air baku untuk air minum, juga dimanfaatkan untuk kepentingan industri dan rumah tangga. Selain sungai, juga terdapat 14 (empat belas) situ di Kabupaten Bekasi, yaitu : Situ Bojongmangu, Burangkeng, Ceper, Ciantra, Cibeureum, Cibungur, Ciplahlar, Lingsir, Liang Maung, Rawa Binong, Taman, Tegal Abidin, Pagadungan, dan Been. Kondisi geografis tersebut menyebabkan bencana banjir kerap melanda Kabupaten Bekasi. Berikut ini disajikan data bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi selama kurun waktu tahun 2012-2017.

Tabel 3. Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017

Tahun	Jenis Bencana			
	Banjir (Kali)	Longsor (Kali)	Peting Beliung (Kali)	Kekeringan (Desa)
1	2	3	4	5
2012	13	4	11	11



Tahun	Jenis Bencana			
	Banjir (Kali)	Longsor (Kali)	Peting Beliung (Kali)	Kekeringan (Desa)
1	2	3	4	5
2013	47	2	12	12
2014	20	1	11	7
2015	5	1	-	7
2016	137	3	3	31
2017	8	-	2	9

Sumber: BPBD Kabupaten Bekasi, 2018.

Jika dilihat tabel diatas, secara langsung maupun tidak langsung, bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi dapat mengganggu proses pencapaian IPM dimana akan menghambat siswa untuk bersekolah, menghambat perekonomian dengan tidak adanya pasar yang beroperasi dan terhambatnya masyarakat ke fasilitas kesehatan akibat terbatasnya jumlah moda transportasi pada saat terjadi bencana. Tidak hanya aspek bencana alam diatas, secara empiris, Kabupaten Bekasi juga terbagi 2 (dua) dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain yaitu wilayah utara dan wilayah selatan. Wilayah utara dengan karakteristik dataran rendah dan berdekatan dengan Teluk Jakarta akan selalu berhubungan dengan potensi terhambatnya pencapaian target IPM kabupaten karena banjir, air pasang dan luapan sungai yang suatu saat dapat menyerang.

Disisi lain, Wilayah Kabupaten Bekasi bagian selatan didominasi oleh perbukitan dan dataran tinggi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Bekasi bagian selatan tidak terlalu bermasalah oleh karena kondisi infrastruktur pendidikan, kesehatan dan penopang perekonomian relatif lebih terpelihara. Kondisi geografis Kabupaten Bekasi bagian selatan lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan kondisi geografis Kabupaten Bekasi bagian utara. Untuk itu, dari sisi pertumbuhan maupun perekonomian wilayah Kabupaten Bekasi bagian selatan lebih cepat tumbuh dan berkembang. Begitupun dalam bidang pendidikan dan kesehatan, akses yang tersedia juga lebih lengkap, mudah dan terpelihara.

Tidak hanya pada struktur tanah, tampak pada kutipan wawancara diatas adanya kelemahan berupa potensi longsor dan banjir yang dapat menghambat aktivitas masyarakat tampak didukung oleh kondisi struktur tanah yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi seperti daerah lembah, daerah lereng gunung, daerah pesisir dan daerah daratan. Semua daerah tersebut dihuni oleh masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Adapun data jumlah Desa di Kabupaten Bekasi berdasarkan tipe daratan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Desa di Kabupaten Bekasi berdasarkan Tipe Daratan

No	Lokasi	Jumlah
----	--------	--------



1	Desa di Lembah DAS	0
2	Desa di Lereng	6
3	Desa di Dataran	172
4	Desa di Pesisir	9

Sumber: RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017.

Tampak pada tabel diatas hampir semua desa berada pada daerah dataran dengan 15 desa berada di desa lereng dan desa pesisir. Meskipun tidak ada desa yang berada di sekitar lembah Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah ini juga dapat menjadi hambatan dalam pencapaian IPM Kabupaten Bekasi. Hal ini dikarenakan posisi geografis Kabupaten Bekasi yang dilalui oleh DAS Citarum yang menjadi salah satu sumber air bersih. Sebagaimana laporan pengembangan BODEBEKKARPUR bahwa DAS Citarum dengan kondisi yang sekarang dalam berpotensi mengancam ketersediaan air bersih dan air baku untuk pertanian dan energi (PLTA).

b. Social Environemnt

Lingkungan sosial merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang memiliki dampak jangka panjang. Lingkungan sosial terdiri dari beberapa aspek yang terdiri dari kekuatan ekonomi, politik dan hukum, teknologi dan sosiokultural. Menurut Wheleen dan Hunger (2012 : 99) terdapat 4 (empat) faktor kekuatan lingkungan yang mempengaruhi industri yaitu :

- 1) *Economic forces that regulate the exchange of materials, money, energy, and information.*
- 2) *Technological forces that generate problem-solving inventions.*
- 3) *Political-legal forces that allocate power and provide constraining and protecting laws and regulations.*
- 4) *Sociocultural forces that regulate the values, mores, and customs of society.*

Faktor tekanan ekonomi dapat menghambat pencapaian IPM daerah dikarenakan faktor ini sedikit sulit untuk dikendalikan. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi nasional dapat mempengaruhi kondisi ekonomi daerah. Perekonomian Kabupaten Bekasi memiliki kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian nasional maupun Provinsi Jawa Barat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bupati Bekasi bahwa “Kabupaten Bekasi merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Jawa Barat yaitu berkontribusi kurang lebih 15 persen”.

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bekasi tidak berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian masyarakat sehingga secara tidak langsung kontribusinya terhadap IPM kurang optimal. Hal ini menjadi nyata ketika inflasi yang



terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir mengakibatkan kenaikan harga barang, kenaikan harga BBM dan lain-lain. Out put sektor industri yang cukup tinggi menyebabkan tingginya angka PDRB Kabupaten Bekasi, walaupun senyatanya masih banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki daya beli yang rendah. Secara riil tingginya nilai PDRB ADHB Kabupaten Bekasi disebabkan oleh peranan industri pengolahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Akan tetapi hasilnya tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bekasi karena banyak dari hasil industri pengolahan yang diekspor. Tercatat ekspor Kabupaten Bekasi meningkat setiap tahunnya walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan yaitu mulai Rp. 1.903,29 USD pada tahun 2012 dan 1.906,44 USD pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan multiplier effect dari adanya industri belum cukup memberikan nilai positif bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Bekasi. Dengan kata lain PDRB yang tinggi di Kabupaten Bekasi bukan disumbangkan dari sektor riil (seperti sektor pertanian, perdagangan, perikanan dan kelautan, jasa) melainkan dari sektor industri pengolahan yang tumbuh dan berkembang karena adanya kawasan industri di Kabupaten Bekasi.

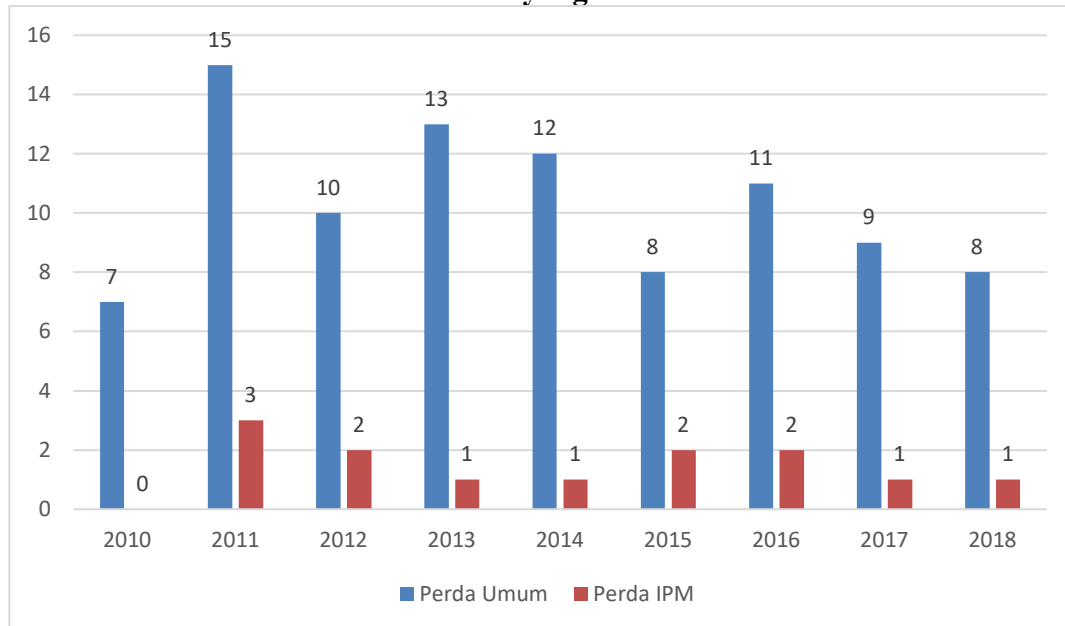
Inflasi merupakan salah satu komponen pembentuk kekuatan perekonomian baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dimana inflasi merupakan kenaikan harga secara rata-rata (agregat), sementara penurunan harga secara rata-rata disebut deflasi. Selama kurun waktu 2012-2017 laju inflasi tertinggi terjadi pada taun 2013 yaitu sebesar 9,71 persen kemudian turun perlahan pada tahun 2014 menjadi 8,13 persen. Tingginya inflasi pada tahun tersebut disebabkan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bersamaan dengan itu, kenaikan harga aneka barang dan jasa ditunjukkan pula oleh persentase perubahan PDRB deflator maupun Indeks Harga Konsumen (IHK). Kenaikan harga yang ditunjukkan oleh IHK lebih rendah yaitu sebesar 3,80 persen dibandingkan dengan persentase perubahan PDRB deflator sebesar 1,80 persen. Ini berarti bahwa pada tahun 2017 tingkat kenaikan harga yang dibayar oleh pemerintah/perusahaan lebih rendah dibandingkan tingkat kenaikan harga yang dibayar oleh rumah tangga untuk mengkonsumsi sejumlah barang/jasa. Sementara untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 inflasi yang terjadi di Kabupaten Bekasi bisa dibilang stabil. Inflasi yang tinggi mengakibatkan rendahnya daya beli. Akan tetapi inflasi yang terlampau rendah juga dapat melemahkan produsen karena mengakibatkan menumpuknya barang-barang hasil produksi karena turunnya permintaan terhadap barang-barang tersebut. Secara umum inflasi yang terjadi di Kabupaten Bekasi selama kurun waktu tahun 2012-2017 relatif stabil, artinya cukup kondusif bagi aktivitas perekonomian di Kabupaten Bekasi. Aktivitas perekonomian yang kondusif tentunya memberikan peluang segar dalam berusaha dan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan kondisi perekonomian yang baik, dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan dasar utama berupa pendidikan dan kesehatan. Kondusivitas perekonomian di Kabupaten Bekasi



tidak menjamin pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi naik setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Bekasi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi naik turun selama tahun 2012-2017, yakni 6,53 persen pada tahun 2012, turun menjadi 6,23 persen pada tahun 2013, turun lagi menjadi 5,88 persen pada tahun 2014, turun terus menjadi 4,66 persen pada tahun 2015, kemudian naik perlahan pada tahun 2016 menjadi 4,99 persen dan terus tumbuh menjadi 5,78 persen pada tahun 2017.

Interaksi politik antara pemerintah Kabupaten Bekasi dan DPRD sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan daerah yang optimal. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bekasi, terjadi interaksi politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Adapun hasil dari interaksi politik tersebut berupa produk hukum daerah termasuk peraturan daerah yang jumlahnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 1. Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2010-2018



Sumber: Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Tahun 2019.

Tampak pada gambar diatas bahwa terjadi fluktuasi dalam produk hukum dalam hal ini perda yang dihasilkan sejak tahun 2010-2018. Jika disimak lagi, peraturan daerah terkait upaya pemerintah daerah secara langsung dalam peningkatan IPM tampaknya tidak menjadi perhatian. Lebih rinci lagi, produk hukum yang setiap tahun dihasilkan adalah terkait dengan penyertaan modal pemerintah daerah ke BUMD dan perizinan perindustrian. Sehubungan dengan produk hukum terkait dengan IPM, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5. Peraturan Daerah terkait IPM Langsung

No	Nomor/Tgl	Tentang	LD
1	7 Tahun 2011 19 Sept. 2011	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	No. 7 Tahun 2011 19 Sept. 2011
2	13 Tahun 2011 29 Des 2011	Perda Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	No.13 Tahun 2011 29 Des 2011
3	14 Tahun 2011 29 Des 2011	Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik	No.14 Tahun 2011 29 Des 2011
4	1 Tahun 2012 8 Maret 2011	Pengelolaan Air Tanah	No. 1 Tahun 2012 8 Maret 2012
5	10 Tahun 2012 28 Desember 2012	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	No. 10 Tahun 2012
6	13 Tahun 2013	Catatan Sipil	No. 13 Tahun 2013
7	6 Tahun 2014 12 Juni 2014	Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	No. 6 Tahun 2014 12 Juni 2014
8	8 1 Tahun 2015 28 Mei 2015	Penyelenggaraan Perpustakaan	No. 8 1 Tahun 2015 28 Mei 2015
9	6 Tahun 2015 21 Oktober 2015	Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) (Perda Inisiatif DPRD)	No. 6 Tahun 2015 21 Oktober 2015
10	4 Tahun 2016	Perda Ketenagakerjaan	No. 4 Tahun 2016 28 Sept 2016
11	10 Tahun 2016	Perda Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin	No. 8 Tahun 2016 29 Desember 2016
12	9 Tahun 2017 27 Desember 2017	Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Perumahan, Rumah susun, dan Perniagaan di kabupaten Bekasi	29 Desember 2017
13	1 Tahun 2018 23 Maret 2018	Kawasan Tanpa Rokok	27 Maret 2018

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Tahun 2019 (diolah oleh peneliti).

Setiap tahunnya, khusus dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, maupun evaluasi kinerja pembangunan daerah terjadi 7 (tujuh) kali pembahasan yaitu pada proses musrenbang (desa, kecamatan dan kabupaten), pembahasan KUA dan PPAS APBD baik murni maupun perubahan, pembahasan RAPBD baik murni maupun perubahan, LKPJ dan Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Perkembangan IPM di Kabupaten Bekasi perlu didukung oleh teknologi informasi. Apabila sebelumnya aktivitas pendidikan, kesehatan maupun perekonomian masih dilakukan secara manual, dengan perkembangan teknologi informasi aktivitas tersebut bisa dilakukan secara online dengan berbagai kemudahan dan fasilitasnya. Senn (1998:12) mengungkapkan bahwa “Mengimplementasikan strategi sering disebut



sebagai “action stage” dari manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi”.

Secara umum, persoalan utama pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Bekasi adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi mulai dari jaringan, perangkat keras hingga perangkat lunak. Ketersediaan jaringan teknologi informasi yang dibutuhkan adalah ketersediaan layanan internet untuk mengoperasikan peralatan yang memanfaatkan teknomoli informasi. Selama kurun waktu tahun 2012-2013 infrastruktur tekonologi informasi belum terbangun di Kabupaten Bekasi, baru kemudian di tahun 2015 mulai dialokasikan anggaran untuk pembangunan teknologi informasi berupa jaringan fiber optik yang melayani sampai sekolah dan penjurus desa.

Sosiokultural merupakan aspek yang sangat mempengaruhi lingkungan, sebagaigaman telah diulas sebelumnya adalah bahwa Ukuran kekuatan sosiokultural terdiri dari gaya hidup, harapan karir, aktivitas konsumen, formasi keluarga, pertumbuhan dan distribusi usia populasi, pergeseran wilayah regional dalam populasi, tingkat harapan hidup dan tingkat kelahiran.

Kelemahan aspek sosiokultur di Kabupaten Bekasi khususnya dalam peningkatan nilai IPM adalah kurang memperhatikan kebutuhan perempuan baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan perekonomian. Hal ini dapat terlihat dari GAP antara IPM dengan IPG, yang rata-rata setiap tahunnya memiliki selisih sampai 2 (dua) digit. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bekasi, pada tahun 2012 terdapat selisih sebesar 16,06 kemudian pada tahun 2013 terdapat selisih sebesar 15,74, tahun 2014 selisihnya sebesar 15,71, tahun 2015 sebesar 16,29 dan tahun 2017 selisihnya sebesar 15,37. Perbedaan dua digit tersebut mengindikasikan besarnya gap antara pembangunan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan data komponen pembentuk IPM indeks pendidikan, selama kurun waktu tahun 2012-2017 harapan lama sekolah laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, yakni pada tahun 2012 laki-laki 11,38 tahun, perempuan 10,97 tahun; tahun 2013 laki-laki 11,81 tahun, perempuan 11,24 tahun; tahun 2014 laki-laki 11,96 tahun, perempuan 11,51 tahun; tahun 2015 laki-laki 11,99 tahun, perempuan 11,48 tahun; dan pada tahun 2017 laki-laki 11,6 tahun, perempuan 11,65 tahun. Apabila diambil nilai rata-ratanya, maka harapan lama sekolah laki-laki adalah 11,95 tahun, sementara rata-rata harapan lama sekolah perempuan adalah 11,57 tahun, selisih 0,38 tahun. Dari aspek harapan lama sekolah tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan.

Berdasarkan aspek rata-rata lama sekolah, kondisinya masih sama dengan harapan lama sekolah, yakni lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan. Pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah laki-laki pada tahun 2012 8,95 tahun, perempuan 7,53 tahun; tahun 2013 laki-laki 9,01 tahun, perempuan 7,72 tahun; tahun 2014 laki-laki 9,08 tahun, perempuan 7,76 tahun; tahun 2015 laki-laki 9,26 tahun, perempuan 8,05 tahun, dan tahun 2017 laki-laki 9,46 tahun, perempuan 8,17 tahun. Apabila



dihitung rata-rata laa sekolahnya, maka rata-rata lama sekolah laki-laki adalah 9,2 tahun, sementara perempuan adalah 7,8 tahun. Artinya terjadi gap 2 tahun antara rata-rata lama sekolah laki-laki dengan perempuan. Gap ini terbilang sangat besar karena selisihnya lebih dari 2 digit.

c. Task Environment

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat diimplementasikan teori Wheelen dan Hunger, dimana teori ini mengarahkan sebuah pemikiran bahwa aktivitas perusahaan secara terus menerus dinilai oleh kelompok stakeholder dalam rangka menentukan kinerja perusahaan, dimana kelompok stakeholder tersebut akan mempengaruhi organisasi untuk memperbaiki situasi kearah yang lebih baik, Hal ini bisa tercermin dalam organisasi/instansi penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam konteks penelitian ini menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang pembangunan manusia yang terbagi dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian (peningkatan daya beli).

Berpijak pada teori yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger tersebut, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, yang dimaksud dengan lingkungan kerja adalah semua stakeholder (pemangku) kepentingan yang terdampak maupun turut serta baik dalam perumusan kebijakan, implementasi kebijakan maupun pengendalian dan evaluasi.

Secara umum, lingkungan kerja yang turut ambil bagian dalam pencapaian IPM Kabupaten Bekasi, memberikan dukungan yang positif terhadap upaya pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan nilai IPM. Lingkungan kerja dimaksud terdiri intansi vertikal, DPRD, dunia usaha, kelompok masyarakat maupun masyarakat.

Lingkungan kerja internal yang kurang kondusif mengakibatkan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi berhadapan dengan persoalan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Inspektur Kabupaten Bekasi “Pengalaman saya pertama itu adalah mengubah dinas pendidikan bukanlah obyek yang selalu salah oleh APH (Aparat Penegak Hukum) kepolisian atau kejaksaan. Bukan organisasi yang selalu salah. Karena dananya besar, resikonya juga besar”. Berangkat dari pendapat tersebut, mengharuskan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi senantiasa menciptakan kondusifitas lingkungan kerja internal yang berimplikasi pada lingkungan kerja eksternal yang terdiri dari DPRD, intansi vertikal, masyarakat, dunia usaha serta kelompok Lembaga swadaya masyarakat.

Aspek lainnya yang menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bekasi adalah sektor pertanian, dimana sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Sama halnya dengan sektor lainnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa memiliki lingkungan kerja yang cukup kondusif, terutama lingkungan kerja yang meliputi instansi vertikal, DPRD, dunia usaha, juga kelompok-



kelompok tani yang ada di Kabupaten Bekasi. Namun terdapat persoalan tersendiri terkait dengan lingkungan kerja eksternal sektor pertanian, yaitu kelompok-kelompok tani yang ada belum memiliki legalitas sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa syarat hibah kepada masyarakat dapat diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi yang bersangkutan.

Internal Strong and Weaknesses

Komponen internal menurut Wheelen & Hunger terdiri atas komponen struktur, budaya, dan sumber daya.

a. Structure

Struktur organisasi dibutuhkan sebagai rentang kendali penugasan dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menitikberatkan pada susunan pembagian tugas yang akan diberikan kepada kewenangan dan fungsi, sehingga tidak semata-mata hanya berbicara mengenai mengenai gedung tempat bekerja saja. Tujuan organisasi yang akan dicapai akan dipengaruhi oleh struktur yang ada, karena struktur membagi, mengelompokkan dan mengkoordinasikan setiap pekerjaan atau tugas secara formal dan sistematis kepada seluruh anggota organisasi yang dikembangkan dan diarahkan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa bentuk skema yang dilukiskan untuk memudahkan dalam memahami bentuk struktur organisasi, mulai dari onigram sampai dengan bentuk bagan yang memberikan keterangan terhadap hubungan organisatoris baik secara vertikal maupun horizontal baik antar jenjang struktur maupun antar individu.

Selama kurun waktu tahun 2012-2017 Struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yaitu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016. Dari 3 (tiga) kali perubahan tersebut, perubahan paling mendasar terjadi pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, karena Peraturan Daerah ini lahir sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan organisasi yang demikian sering terjadi, menyebabkan beberapa program kegiatan agak terhambat, karena adanya penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi :

“Kalau menurut saya, struktur organisasi sudah cukup memadai. Mau dibikin gemuk, mau dibikin ramping, saya pikir memadai yang penting semua urusan-



urusan yang ada di bidang pendidikan, kesehatan itu terwadahi dan dapat diimplementasikan. Hanya yang paling penting adalah bagaimana mengoptimalkan, menggerakkan organisasi supaya bekerja lebih maksimal. Kalau struktur tidak terlalu berpengaruh menurut saya. Tetapi pengaruhnya ada pada penyesuaian pelaksanaan pekerjaan, kadang setelah terjadi reorganisasi, perangkat daerah yang mengalami perubahan uraian tugas, tidak langsung menyesuaikan program dan kegiatan yang ada dengan uraian tugas yang ada. Saya melihat dari sudut pandang Bappeda selaku koordinator program dan kegiatan”.

Perubahan struktur organisasi yang terjadi pada kurun waktu tahun 2012-2017, memberikan dampak pada beberapa perangkat daerah. Permasalahan struktur organisasi terjadi pada Dinas Pendidikan terjadi pada tahun 2012-2014, yakni beban kerja yang terlalu berat pada salah satu seksi yang ada pada dinas tersebut, yakni dan Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar dan Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar yang keduanya menangani SD dan SMP dengan jumlah SD dan SMP yang cukup banyak di Kabupaten Bekasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi : “Satu hal lagi, struktur organisasi yang dibentuk jangan sampai tidak proporsional, karena nantinya ada unit yang kelebihan beban kerja atau sebaliknya”. Persoalan beban kerja muncul kembali pada tahun 2014-2016 yakni hilangnya bidang sarana dan prasarana pendidikan, karena beban kerja yang diampu oleh Bidang SD dan SMP cukup berat karena harus menangani pula sarana pembelajaran yang sebelumnya dilakukan oleh bidang tersendiri.

b. Culture

Dalam prakteknya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan sepakat memberikan pandangan terkait budaya organisasi bahwa saat ini budaya kerja dan etos kerja pegawai masih perlu ditingkatkan mengingat kondisi pegawai di Kabupaten Bekasi masih ada yang “malas” bekerja. Hal ini dikarenakan pegawai tidak ada inisiatif untuk melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan kreatifitas bekerja jika tidak ada instruksi dari pimpinan. Dengan kata lain pegawai pada umumnya masih menunggu arahan pimpinan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Selain itu, pegawai yang sudah berusia tua belum dapat menyesuaikan pekerjaannya dengan pengembangan teknologi yang ada. Kekurangan tersebut sepertinya dirasakan oleh pegawai yang bersangkutan sehingga pegawai tersebut saat ini pekerjaannya hanya menunggu jam pulang. Bentuk aturan tertulis mengenai Budaya Kerja juga belum ada selama kurun waktu tahun 2012-2017. Sehingga jika terbentuk sebuah budaya kerja, semata-mata karena tingkat kesadaran yang telah dimiliki oleh masing-masing individu. Peraturan tentang budaya kerja baru ditetapkan pada tahun 2019 melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Budaya Kerja di Lingkungan



Pemerintah Kabupaten Bekasi dimana dikatakan bahwa Budaya kerja "...dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak bahwa budaya kerja organisasi belum terbangun secara melembaga di Kabupaten Bekasi pada tahun 2012-2017 karena belum sepenuhnya dimengerti oleh pegawai dapat menghambat kinerja organisasi khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta perangkat daerah terkait lainnya dalam pencapaian target IPM Kabupaten Bekasi.

c. Resources

Jumlah pegawai di Lingkup Kabupaten Bekasi mayoritas lulusan S1 dan SMA. Lulusan S1/D4 jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Instansi Pemerintah merupakan syarat bagi jabatan pelaksana analis, pengolah data, pengelola data, dan lain-lain. Sementara lulusan SMA dalam peraturan tersebut teknisi, penilik, pengadministrasi, dan lain-lain. Tabel diatas juga menampilkan bahwa rata-rata pejabat dari pengawas hingga JPT berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas memiliki tingkat pendidikan S1. Sehingga jika dikurangi dengan pejabat, maka jabatan pelaksana yang berpendidikan S1 itu jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan lulusan SMA.

Adapun hubungan kondisi tersebut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah profil pegawai negeri sebagai pelaksana adalah mayoritas berpendidikan SMA sementara disisi lain kebutuhan akan pegawai yang memiliki kualifikasi mumpuni sangat tinggi sehingga kondisi tersebut dapat menjadi batu sandungan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini diakui oleh Bupati Bekasi yang mengatakan bahwa:

Kondisi SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi secara kuantitas sudah memadai (diluar tenaga pendidikan dan kesehatan), namun secara kualitas masih kurang. Untuk jumlah PNS guru dan dokter, bidan, serta tenaga medis lainnya jumlahnya masih kurang, sehingga kita masih harus dibantu oleh guru honorer yang sampai dengan saat ini jumlahnya ada sekitar 9.000 orang. Harapan kedepannya perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur khususnya di instansi yang berkewajiban meningkatkan IPM di Kabupaten Bekasi (wabil khusus di Dinas Pendidikan dan Kesehatan).

Berdasarkan kutipan diatas, tampak bahwa pegawai di Kabupaten Bekasi telah memenuhi secara kuantitas tetapi masih kurang secara kualitas. Sehingga keterampilan



dan pengetahuan yang dimiliki pegawai negeri sipil dapat mempengaruhi tingkat capaian target organisasi dalam hal ini pencapaian IPM masyarakat Kabupaten Bekasi.

Dalam pembangunan manusia di Kabupaten Bekasi, yang dibutuhkan tidak hanya sumber daya manusianya saja, akan tetapi dibutuhkan juga sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang digunakan dalam percepatan pencapaian tujuan. Sarana dan prasarana yang dimaksud oleh teori Whelen dan Hunger adalah fasilitas pabrik dalam wilayah fungsional. Apabila dikaitkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian IPM Kabupaten Bekasi dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, khususnya yang terkait dengan pencapaian IPM.

Apabila ditinjau dari ketersediaan sarana dan prasarana yang ada khususnya pada perangkat daerah terkait dengan pencapaian IPM Kabupaten Bekasi, maka sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan jumlahnya masih terbatas. Jumlah gedung yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan sebanyak 326 gedung sekolah pada tahun 2012, 123 gedung sekolah dan 82 gedung perpustakaan pada tahun 2013, 125 gedung sekolah dan penambahan 21 gedung perpustakaan pada tahun 2014, 123 gedung sekolah dan penambahan 5 gedung perpustakaan pada tahun 2015 dan 116 gedung sekolah dan penambahan 3 gedung perpustakaan pada tahun 2016. Kondisi ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi, yakni sebanyak 708 SD Negeri, 96 SMP Negeri, 44 SMU negeri dan 15 SMK negeri. Kondisi Gedung sekolah yang tidak memadai tersebut menyebabkan diberlakukannya 3 sampai 4 rombongan belajar untuk SD setiap harinya, dan 2 (dua) rombongan belajar untuk SMP dan SMU.

PENUTUP

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bekasi adalah : a) Lingkungan dan Kondisi Alam Kabupaten Bekasi; b) Tingginya Inflasi yang terjadi pada 3 (tiga) tahun berturut-turut; c) *multiplier effect* dari adanya industri belum cukup memberikan nilai positif bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Bekasi d) budaya patriarkhi masih kental di Kabupaten Bekasi; e) Minimnya peraturan daerah yang diterbitkan terkait pencapaian IPM; f) Ketersediaan fasilitas teknologi dan informasi masih terbatas; g) Alokasi anggaran pada program yang tidak konsisten mengakibatkan pelaksanaan program tidak berkesinambungan h) Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang disebabkan Kebijakan Pemerintah.

Perencanaan strategis dari faktor internal berupa pemenuhan kebutuhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung aktivitas pekerjaan perlu diperhatikan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dari aspek sumber daya manusia, perlu dilakukan penghitungan kembali terhadap beban kerja organisasi sehingga bisa diperoleh kebutuhan personil secara proporsional. Begitupun



dari aspek kompetensinya, perlu ditambahkan pegawai dengan kompetensi yang memadai. Sementara dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana, perlu dipetakan kembali kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2016. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- David, Fred. R and Forest R. David. 2015. *Strategic Management: Concepts and Cases. Fifteenth Edition*. Pearson: London
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Cetakan Pertama. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dunn, William N. 2003. Terjemahan: *Public Policy Analysis: An Introduction (Pengantar Analisis Kebijakan Publik), Edisi Kedua*, Penerjemah: S. Wibawa, D. Asitadani, A. Heruanto H. E. A. Purwanto. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Public Policy Studies.
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : CV. Indra Prahasta.
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Frans Magnis Suseno. 1986. *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan*. Jakarta : PT Gramedia.
- Freeman, R. Edward and John McVea. n.d. *A Stakeholder Approach to Strategic Management*. Working Paper No. 01-02. The Darden Scholl: University of Virginia.
- Guy Politzer & Jean Baratgin (2016) Deductive schemas with uncertain premises using qualitative probability expressions, *Thinking & Reasoning*, 22:1, 78-98, DOI: 10.1080/13546783.2015.1052561
- Haming, Murfudin dan Mahfud Nurnajamuddin. 2011. *Manajemen Produksi Modern (Operasi Manufaktur dan Jasa) Buku 1*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wheelen, Thomas L dan J. David Hunger. 2012. *Strategic Management and Business Policy (Toward Global Sustainability)*. USA : Pearson Education, Inc, Publishing as Prentice Hall.
- Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E., 1975. "The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework". *Administration and Society, Vol.6 No.4*. London: Sage Publications, Inc.



Yolanda, Y. (2017). Analysis of factors affecting inflation and its impact on human development index and poverty in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20(4B), 38-56.

